ANALISIS PENGARUH REVITALISASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN

Syamruddin¹, Ahmad Yani Nasution²

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang¹, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang²

dosen01343@unpam.ac.id1, ahmed_nasty@yahoo.co.id2

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kondisi pasar-pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh revitalisasi pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan terhadap pendapatan daerah. Selain itu untuk melihat perbandingan antara pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern. Adapun metode yang digunakan adalah metode sebab-akibat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif dan kompetitif dari hubungan sebab akibat revitalisasi pasar dengan pendapatan daerah. Disebabkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka selama penelitian dimungkinkan adanya perkembangan penelitian atau hasil dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi terhadap pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan perlu segera dilakukan. Sebab potensi pendapatan daerah yang akan diperoleh setelah revitalisasi antara lain pengelolaan parkir, pajak restoran, reklame, izin usaha pertokoan, pajak bumi dan bangunan, penyewaan perkantoran, penyewaan tempat untuk pameran, penyewaan toko seperti di mall, rumah dan toko (ruko), dan pengelolaan sampah. Sedangkan implikasi dari hasil penelitian ini adalah dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang revitalisasi pasar tradisional.

Kata kunci : Revitalisasi, Pasar Tradisional, Retribusi, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

This study describes the condition of traditional markets in South Tangerang City. The study aims to determine the effect of traditional market revitalization in South Tangerang City on regional income. In addition to see the comparison between traditional market management and modern markets. The method used is a causal method. The data analysis method used is a comparative and competitive analysis of the causal relationship between market revitalization and regional income. Because this research is a qualitative study, so long as the research is possible the development of research or the results of the formulation of the problem that has been determined. The results showed that the revitalization of traditional markets in South Tangerang City needs to be done immediately. Because the potential of regional income that will be obtained after revitalization includes parking management, restaurant tax, billboards, shop business permits, land and building taxes, office rentals, rental of places for exhibitions, rental of shops such as in malls, houses and shops (shop), and waste management. While the implications of the results of this study are the issuance of the South Tangerang City Government's policy on revitalizing traditional markets.

Keyword: Revitalization, Traditional Markets, Retribution, Regional Revenue

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

PENDAHULUAN

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan daerah Kota Tangerang Untuk Selatan. lebih memudahkan penelitian, maka subjek yang diteliti adalah para pengelola pasar tradisional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas-Dinas yang terkait dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan. Lokasi penelitian meliputi Pasar Serpong, Pasar Jengkol, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Jombang, Pasar Kita Pamulang, Pasar Ciputat, dan Pasar Cimanggis.

Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah pecahan atau pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota merupakan daerah urban dari Kota Metropolitan Jakarta ini didirikan berdasarkan UU. No. 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008.

Kota Tangerang Selatan memiliki tujuh wilayah kecamatan dan 54 kelurahan. Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah suburban yang berada di pinggir DKI Jakarta. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah: (1) sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang; (2) sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok; (3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.



Gambar 1. Peta Kota Tangerang Selatan

Martini *et al* (2016), mengatakan, perlunya revitalisasi pasar dengan menjaga keamanan pasar agar dapat kondusif. Saran yang diberikan yaitu dengan strategi pertumbuhan, baik dengan cara integrasi

vertikal, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. [9]

Secara demografi, geografi, ekonomi, Kota Tangerang Selatan memiliki potensi yang sangat besar bagi perkembangan pasar tradisional. Apalagi, dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatkan. Namun, kontribusi dari retribusi masih sangat kecil.

Oleh karena itu, maka cara yang tepat untuk meningkatkan pendapatan pasar selain dengan retribusi adalah melakukan revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu proses cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Atau dengan kata lain, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/ degradasi.

Ahmad Heri Firdaus, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) (2019), mengemukakan, revitalisasi pasar sangat bagus untuk menarik kembali konsumen-konsumen agar mau berbelanja ke pasar dan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan utama. Dengan semakin ramainya pasar tradisional, maka kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk semakin berkembang jadi luas. Hal ini mengingat badan pengelola pasar tradisional kerap memiliki pola kemitraan dengan UMKM. Sehingga keterlibatan pemerintah di sini penting, terutama akan bisa memicu perekonomian di wilayah yang dimotori UMKM. [2]

Sementara itu Sukaatmadja (2014), dengan menggunakan analisis SWOT, saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan mereduksi kelemahan yang terdapat dalam pasar tradisional, yaitu: penyediaan sarana parkir, pembaharuan metode transaksi, penertiban lapak zonasi, tata kelola limbah/sampah pasar, penyediaan fasilitas umum, dan pelayanan konsumen.

Selama ini pengelolaan pasar-pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia kurang maksimal. Termasuk pengelolaan

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kendati rencana pengelolaannya akan diserahkan ke BUMD Tangerang Selatan, namun pasar-pasar tersebut masih dibiarkan berkembang begitu saja sehingga optimalisasi pendapatan yang diharapkan dari aset tersebut tidak bisa dilakukan maksimal. Pengelolaannya pun baru sebatas dalam bentuk manajemen yang sederhana. Kondisi pasar yang tidak nyaman membuat masyarakat semakin lama semakin meninggalkan pasar tradisional.

Berikut kondisi sebagian pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2. Kondisi Pasar



Gambar 3. Kondisi Pasar



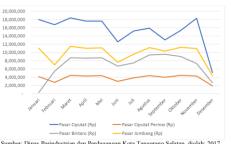
Gambar 4. Kondisi Pasar

Dari 21 indikator persaingan bauran pemasaran, sebanyak 76% dikuasasi oleh pasar modern (Purwanto, 2012). [13]

Selain itu, studi yang dilakukan Sadino dan Syahbana (2014) misalnya menyimpulkan, keunggulan pasar modern dibanding pasar tradisional terletak pada atribut keragaman, kualitas barang, kenyamanan, promosi serta lokasi. [14]

Membaca situasi demikian, masalah pasar tradisional sebenarnya memang bersumber dari tubuh internalnya sendiri (Suryadarma, 2007). [18]

Pada penelitian sebelumnya, Pitri Yandri, dalam tulisannya berjudul: Tarif "Determinasi Retribusi Pasar Tradisional Dengan Pendekatan Willingness To Pay dan Perbandingan Harga Pasar", menunjukkan bahwa pendapatan retribusi dari beberapa pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan masih sangat kecil. [20] Hal itu sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, diolah; 2017. Keterangan: data Pasar Ciputat Permai & Pasar Jombang sampai dengan 12 Desember 2017; data Pasar Ciputat dan Pasar Bintaro sampai dengan 8 Desember 2017.

Gambar 5. Pendapatan Retribusi

Dalam penelitian ini, penulis pengaruh menemukan adanya antara revitalisasi tradisional dengan pasar pendapatan daerah. Apabila dilakukan revitalisasi, maka pendapatan tidak hanya dari retribusi pasar, namun juga akan berasal dari pos-pos lain seperti pengelolaan perparkiran, pajak restoran, dan reklame. Sebagaimana halnya pengelolaan pasar yang telah dilakukan oleh dua Pasar Modern yang ada di Kota Tangerang Selatan yaitu Pasar Modern BSD, Serpong dan Pasar Modern Bintaro.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan pasar tradisional dan bagaimana pentingnya dilakukan revitalisasi. Kemudian sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan di mana dengan adanya revitalisasi maka pengelolaan pasar akan berdampak

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

pada peningkatan pendapatan daerah, tidak hanya melalui retribusi pasar.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan pada penelitian adalah dengan cara pengumpulan data sekunder, melakukan observasi, dan survei. Selanjutnya dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada para responden untuk mengumpukan data primer. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya revitalisasi pasar di Kota Tangerang Selatan.

Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari data sekunder sesuai yang dibutuhkan. Data sekunder penelitian ini berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah analisis.

Untuk medapatkan data sekunder penulis juga melakukan penelahaan literatur seperti halnya buku-buku kuliah dan data yang diperoleh dalam bentuk jadi, yang sudah diolah oleh pihak lain. Bahan-bahan tersebut biasaya dalam bentuk publikasi serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan analisis komparatif dan kompetitif dari hubungan sebab akibat revitalisasi pasar dengan pendapatan daerah.

Kemudian data dianalisis dengan pertanyaan penelitian yang relevan dengan revitalisasi pasar di Kota Tangerang selatan. Melakukan pengamatan pendahuluan di mana dalam proses tersebut dilakukan penggalian data melalui studi pustaka untuk menyusun pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai salah satu alat penggali data dari nara sumber yang berwenang. Selanjutnya pengujian keabsahan data dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif.

HASIL

Program revitalisasi pasar tradisional atau pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas

pengelolaan pasar rakyat guna peningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah : (1) mendorong agar pasar rakyat lebih modern mampu bersaing dengan perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat. (2) Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah. (3) Mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya.

Konsep dan prinsip revitalisasi pasar rakyat yang merupakan program revitalisasi pasar rakyat Kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan manajemen. Adapun prinsip-prinsip revitalisasi yang dimaksudkan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 6. Konsep Revitalisasi

Berdasarkan hasil observasi dan interview yang dilakukan di pasar modern yang ada di Kota Tangerang Selatan, yaitu Pasar Modern BSD dan Pasar Modern

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

Bintaro, apabila dibandingkan dengan pasar tradisional maka akan terlihat sekali perbedaan sumber pendapatan pada kedua jenis pasar tersebut. Di pasar modern, sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah, selain retribusi pasar juga dari pengelolaan parkir, pemasangan reklame, pajak restoran, izin usaha pertokoan, dan lain-lain. Sedangkan di pasar tradisional sumber pendapatan yang bisa diperoleh oleh pemerintah hanya berasal dari retribusi pedagang.

Selanjutnya, untuk lebih mendapatkan data yang akurat terhadap rencana revitalisasi pasar tradisional di Tangerang Selatan, selain melakukan wawancara dan pengambilan data ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak pengelola pasar tradisional, juga dilakukan sinkronisasi ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Sebab dalam revitalisasi pasar tradisional tidak hanya bisa mengandalkan satu dinas, namun perlu keterkaitan antara dinas-dinas yang berhubungan dengan pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dinas.

Pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan baru mulai memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2016. Bahkan ada dua pasar yang baru memberikan kontribusi retribusi pada tahun 2018. Tentu, hal itu dapat dimaklumi karena penyerahan aset pasar dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun data pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pasar Tradisional Tangsel

DATA PASAR TRADISIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Gambar Pasar	Nama Pasar	L	okasi	Luas Tanah/Luas Bangunan (-/+) m²	Dikelola Oleh	Alamat Pasar	Tahun Berdiri	Mulai dikenakan Retribusi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan
1		Pasar Ciputat	Kec. Ciputat	Kel. Ciputat	Lt : 5.670 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Aria Putra	1997	Tahun 2016
2		Pasar Ciputat Permai (Cimanggis)	Kec. Ciputat	Kel. Cipayung	Lt: 1.000 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. RE Martadinata	1997	Tahun 2016
3		Pasar Jombang	Kec. Ciputat	Kel. Jombang	Lt : 6.095 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Jombang	1997	Tahun 2016
4		Pasar Bintaro Sektor 2	Kec. Ciputat Timur	Kel. Rengas	Lt : 830 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Perkutut Raya	2005	Tahun 2016
5		Pasar Serpong	Kec. Serpong	Kel. Serpong	Lt: 8.730 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Serpong	2007	Tahun 2016
6	PARTIE NO.	Pasar Jengkol	Kec. Setu	Kel. Babakan	Lt: 1,500 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Raya Pasar Jengkol	2008	Tahun 2018
7		Pasar Kita Pamulang	Kec. Pamulang	Kel. Pamulang Barat	Lt : 11.199 M ²	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Jl. Pajajaran	2015	Tahun 2018

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

Penerimaan retribusi dari masingmasing pasar tradisional yang sudah masuk kas daerah sejak tahun 2016 masih sangat sedikit sekali. Apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah tersebut sangat tidak signfikan.

Sumbangan retribusi dari pasar tradisional belum dapat dijadikan sebagai salah satu komponen bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sehingga perlu dilakukan terobosan dalam tata kelola pasar tradisional agar kelak menjadi salah satu sektor yang bisa dijadikan pos untuk penambahan pendapatan daerah. Adapun penerimaan retribusi dari pasar tradisional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Penerimaan Pasar Tradisional

					(Rp.)
No.	Nama Pasar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Jumlah
1	Pasar Jombang	127.479.500	134.311.500	126.638.500	388.429.500
2	Pasar Ciputat	183.028.300	187.168.200	240.827.500	611.024.000
3	Pasar Ciputat Permai (Cimanggis)	49.286.000	49.264.400	49.194.000	147.744.400
4	Pasat Bintaro Sektor 2	101.413.550	105.443.000	137.640.850	344.497.400
5	Pasar Serpong	708.944.076	744.391.344	744.391.344	2.197.726.764
6	Pasar Kita Pamulang	·	14	19.621.000	19.621.000
7	Pasar Jengkol			29.187.000	29.187.000

PENERIMAAN RETRIBUSI PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA TANGERANG SELATAN



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2019, Diolah.

Apabila dilihat dari total pendapatan daerah dari pos retribusi, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi retribusi pasar masih sangat sedikit. Secara berturut-turut tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, hasil retribusi daerah pada ABPD Kota Tangerang Selatan yaitu Rp. 88.916.066.000,-, Rp. 90.852.771.000,-, dan Rp. 80.729.540.514,-.

Sementara itu pendapatan dari hasil retribusi pasar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu berturut-turut sebesar Rp. 1.170.151.426,-, Rp. 1.220.578.444,-, dan Rp. 1.347.500.194,-.

Dengan demikian kontribusinya dapat dikatakan masih sangat kecil yaitu berkisar antara 1% sampai 1,5%.

Kecilnya retribusi pasar tradisonal dapat dipahami mengingat lemahnya pengelolaan yang dilakukan selama ini. Hal ini bisa diketahui secara jelas, apabila dibanding dengan pasar modern yang sudah melakukan manajemen secara modern dalam pengelolaannya.

Untuk lebih memberikan gambaran mengenai besaran pendapatan daerah dari hasil retribusi daerah mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 dan rencana pada tahun

Enhancing Innovations for Sustainable Development: Dissemination of Unpam's Research Result

2019, maka dapat dilihat pada tabel detail APBD Kota Tangerang Selatan berikut.

Tabel 3. APBD Kota Tangerang Selatan 2014 s/d 2019

APBD KOTA TANGERANG SELATAN DARI TAHUN 2014 S/D TAHUN 2019

Heal Retricks Dezerh 74.41.330.00.000 53.223.330.000.000 88.916.666.00.000 90.92771.000.000 80.9279.540.514.00 79.786.000.000 14.71.100.000	Uraian	Tahun 2014 (rupiah)	Tahun 2015 (rupiah)	Tahun 2016 (rupiah)	Tahun 2017 (rupiah)	Tahun 2018 (rupiah)	Tahun 2019 (rupiah)
Perdeplace had Decreb 13.00 13.0							
Heal Retricks Dezerh 74.41.330.00.000 53.223.330.000.000 88.916.666.00.000 90.5277.100.000 80.927.000.000 79.786.000.000 14.71.100.000 14.75.524.605.000.000 14.71.100.000 14.75.524.605.000.000 14.71.100.000 14.75.524.605.000.000 14.75.724.724.000 14.75.724.605.000.000 14.75.724.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 14.75.724.000.000 1							
Line							1.396.050.000.000,00
22,936,581,810,000 25,287,547,320 10,510,100,000 134,542,810,000,000 134,542,810,000,000 145,552,456,514,000 1,619,392,106,000		74.441.330.000,00	63.323.330.000,00	88.916.066.000,00	90.852.771.000,00	80.729.540.514,00	79.768.000.000,00
Dans Bagi Hall Pigki Bagi Hasi	production and the second seco	22.045.638.180,00	52.898.254.973,00	105.310.048.000,00	104.703.040.000,00	113.945.000.000,00	143.214.106.000,00
Dans Bagi Halip Ripki Rage Halip 106.775.375.487,00 109.750.967.00,00 138.2404.956.000,00 188.346.854.000,00 184.291.149.000,00 228.675.290.366	Jumlah Pendapatan Asi Daerah	799.986.968.180,00	963.221.584.973,00	1.196.706.114.000,00	1.315.641.811.000,00	1.455.524.540.514,00	1.619.032.106.000,00
Dans Bagi Halip Ripki Rage Halip 106.775.375.487,00 109.750.967.00,00 138.2404.956.000,00 188.346.854.000,00 184.291.149.000,00 228.675.290.366	Dana Barimhanaan			7			
Bukan Pajak 106. 167.							
Dana Alokasid Irmum		106.725.375.487,00	109.750.967.000,00	132.404.926.000,00	163.946.854.000,00	184.291.149.000,00	228.675.290.369,00
Dana Alokasi Rimus		566,429,457,000,00	609.519.143.000.00	581.505.815.000.00	634.150.767.702.00	572.637.313.000.00	609.575.078.000.00
Jumba Dama Perimbangan 697.127.312.487,00 744.344.030.000,00 940.208.067.300,00 947.147.128.702,00 909.630.944.000,00 97.495.642.365							159.245.274.000,00
Sah							997.495.642.369,00
Sah							
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Deerah Lainnya							
See	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	92.240.600.000,00	90.420.000.000,00
Section Sect	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi						
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Demerintiah Daerah Lainnya Demerintiah Daerah Demerintiah Daerah Daerah Demerintiah Daerah Daerah Demerintiah Daerah Demer		426.539.397.793,00	433.101.896.000,00	434.480.021.571,00	462.897.133.035,01	518.444.788.999,00	550.940.701.227,00
Demain Lainnya	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	25.270.927.000,00	129.531.038.000,00	0	0	35.000.000.000,00	29.155.470.000,00
IJUMIAH TOTAL PENDAPATAN		0	51.443.901.125,00	9.065.201.500,00	50.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0
JUMILAH TOTAL PENDAPATAN 1.948.924.605.460,00 2.321.642.450.098,00 2.580.459.404.371,00 2.775.686.072.737,01 3.075.840.873.513,00 3.287.043.919.596							
Belanja Propinsi/Kabupaten/Kota, Provinsi/Kabupaten/Kota, Provinsi/Ka	yang sah	451.810.324.793,00	614.076.835.125,00	443.545.223.071,00	512.897.133.035,01	710.685.388.999,00	670.516.171.227,00
Belanja Propinsi/Kabupaten/Kota, Provinsi/Kabupaten/Kota, Provinsi/Ka							
Belanja Tidak Langsung 478.112.051.665,00 640.991.173.388,57 7729.015.399.464,00 646.100.474.665,01 847.315.755.286,66 917.195.999.062 Belanja Hibah 12.7455.400.000,00 29.568.000.000,00 67.490.395.000,00 83.949.800.000,00 79.148.700.000,00 43.061.530.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 722.638.442,00 416.319.293,00 416.319.293,00 416.319.293,00 1.940.036.800,00 1.940.036.800,00 Pemerintahan Desa dan Partai Politik 722.638.442,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.3335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Brang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 952.239.304.793,00 397.073.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Brang dan Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.64	JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	1.948.924.605.460,00	2.321.642.450.098,00	2.580.459.404.371,00	2.775.686.072.737,01	3.075.840.873.513,00	3.287.043.919.596,00
Belanja Tidak Langsung 478.112.051.665,00 640.991.173.388,57 7729.015.399.464,00 646.100.474.665,01 847.315.755.286,66 917.195.999.062 Belanja Hibah 12.7455.400.000,00 29.568.000.000,00 67.490.395.000,00 83.949.800.000,00 79.148.700.000,00 43.061.530.000 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 722.638.442,00 416.319.293,00 416.319.293,00 416.319.293,00 1.940.036.800,00 1.940.036.800,00 Pemerintahan Desa dan Partai Politik 722.638.442,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.00 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.3335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Brang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 952.239.304.793,00 397.073.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Brang dan Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.64	RELANIA DAFRAH						
Belanja Pegawai 478.112.051.665,00 640.991.173.388,57 729.015.399.464,00 646.100.474.665,01 847.315.755.286,66 917.195.989.062 Belanja Hibah 17.455.400.000,00 29.568.000.000,00 67.490.395.000,00 83.949.800.000,00 79.148.700.000,00 43.061.530.000 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,000,00 1.944.000.000,00 416.319.293,00 416.319.293,00 1.940.036.800,00 1.940.036.800,00 Perwinst/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 722.638.442,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217.43 5.123.370.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.990,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Begawal 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.990,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Belanja Hodai 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.299.807.90.966,0							
Belanja Hibah 17.455.400.000,00 29.568.000.000,00 67.490.395.000,00 83.949.800.000,00 79.148.700.000,00 43.061.530.000		478.112.051.665.00	640.991.173.388.57	729.015.399.464.00	646.100.474.665.01	847.315.755.286.66	917.195.989.062,84
Belanja Bantuan Sosial 20.000.000.000,00 1.944.000.000,00 - 2.124.500.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 722.638.442,00 416.319.293,00 416.319.293,00 1.940.036.800,00 1.940.036.800,00 Belanja Tidak Terduga 4.168.244.944,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Pegawai 685.595.434.553,00 7720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304,793,00 397.703.708.570,00 1.88.862.016.117 Belanja Modal 1.053.7772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.8086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.8608.03 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.5							43.061.530.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 4.168.244.944,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.000 1.mlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Brang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 884.688.199.374,00 958.293.304.793,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Brang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 884.688.199.374,00 958.293.304.793,00 397.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.7711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANIA DAERAH 2.493.574.062.460,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.638 Pemerintah Daerah Penyertaan Modal/Inverstasi Pemerintah Daerah 1.054.570.00,00 1.281.794.659.100,00 1.280.000.000,00 1.280.000				-	-		0
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 4.168.244.944,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung Belanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Iangsung 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.799.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Peneriman Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi Peny							
Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga 4.168.244.944,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.000 1.mlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 8elanja Langsung 8elanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 8elanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.1178 8elanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.030 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANIA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 0 0 22.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639 JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639	Belanja Bantuan Keuangan Kepada						
Belanja Tidak Terduga 4.168.244.944,00 9.356.747.940,43 14.491.447.000,00 1.741.000.000,00 4.149.299.217,43 5.123.370.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung	Provinsi/Kabupaten/Kota,	722.638.442,00	416.319.293,00	416.319.293,00	416.319.293,00	1.940.036.800,00	1.940.036.800,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Penyerinaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0	Pemerintahan Desa dan Partai Politik					15 00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung 520.458.335.051,00 682.276.240.622,00 811.413.560.757,00 732.207.593.958,01 934.678.291.304,09 967.320.925.863 Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Penyerinaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0							
Belanja Langsung 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.799.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.042,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penerimtah Daerah 21.780.000.000,00 0 <t< td=""><td>Belanja Tidak Terduga</td><td>4.168.244.944,00</td><td>9.356.747.940,43</td><td>14.491.447.000,00</td><td>1.741.000.000,00</td><td>4.149.299.217,43</td><td>5.123.370.000,16</td></t<>	Belanja Tidak Terduga	4.168.244.944,00	9.356.747.940,43	14.491.447.000,00	1.741.000.000,00	4.149.299.217,43	5.123.370.000,16
Belanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Barang dan Jasa 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.799.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMIAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah 966.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pemerintah Daerah 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 477.345.023.639	Jumlah Belanja Tidak Langsung	520.458.335.051,00	682.276.240.622,00	811.413.560.757,00	732.207.593.958,01	934.678.291.304,09	967.320.925.863,00
Belanja Pegawai 233.747.340.875,00 284.273.457.184,00 335.810.816.300,00 332.108.785.900,00 395.020.945.600,00 408.538.140.452 Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Barang dan Jasa 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.799.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMIAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah 966.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pemerintah Daerah 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 477.345.023.639	Relania Lanasuna	7					
Belanja Barang dan Jasa 685.595.434.553,00 720.808.518.772,00 864.688.199.374,00 958.293.304.793,00 937.703.708.570,00 1.188.862.016.117 Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMIAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengerinath Obaerah 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 477.345.023.639 JUMIAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639		222 747 240 975 00	204 272 457 104 00	225 910 916 200 00	222 109 795 000 00	205 020 045 600 00	409 529 140 452 00
Belanja Modal 1.053.772.951.981,00 1.156.529.829.489,00 1.292.809.790.968,00 1.421.076.388.086,00 1.281.743.635.613,00 1.199.667.860.803 Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeritah Daerah 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000 22.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639 JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Jumlah Belanja Langsung 1.973.115.727.409,00 2.161.611.805.445,00 2.493.308.806.642,00 2.711.478.478.779,00 2.614.468.289.783,00 2.797.068.017.372 JUMIAH TOTAL BELANJA DAERAH 2.493.574.062.460,00 2.843.888.046.067,00 3.304.722.367.399,00 3.443.686.072.737,01 3.549.146.581.087,09 3.764.388.943.235 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Penyertaan Modal/Investasi Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00							
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000 22.000.000.000 10							2.797.068.017.372,00
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000 22.000.000.000 10							
Penerimaan Pembiayaan Daerah 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.639 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 Pemerintah Daerah JUMILAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH	2.493.574.062.460,00	2.843.888.046.067,00	3.304.722.367.399,00	3.443.686.072.737,01	3.549.146.581.087,09	3.764.388.943.235,00
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 566.429.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 495.305.707.574,09 499.345.023.635 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,00 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 JUMILAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.635	PEMBIAYAAN						
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,000 0 0 22.000.000.000,000 22.000.000.000,000 Pemerintah Daerah JUMIAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,000 0 0 22.000.000,000,000 22.000.000,000,000 JUMIAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,000 473.305.707.574,09 477.345.023.639	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	566.429.457.000,00	522.245.595.969,00	724.262.963.028,00	668.000.000.000,00	495.305.707.574,09	499.345.023.639,00
Penyertaan Modal/Investasi 21.780.000.000,000 0 0 22.000.000,000,000 22.000.000,000,000 JUMIAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,000 473.305.707.574,09 477.345.023.639							
Pemerintah Daerah 21.780.000.000,00 0 0 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 22.000.000.000 JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639							
JUMIAH TOTAL PEMBIAYAAN 544.649.457.000,00 522.245.595.969,00 724.262.963.028,00 668.000.000.000,00 473.305.707.574,09 477.345.023.639	TOTAL CONTRACTOR CONTR	21.780.000.000,00	0	0	0	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
		544,649,457,000,00	522,245,595,969,00	724,262,963,028,00	668,000,000,000,00	473,305,707,574,09	477.345.023.639,00
1.948.924.605.460,00 2.321.642.450.098,00 2.580.459.404.371,00 2.775.686.072.737,01 3.075.840.873.513,00 3.287.043.919.596	JOHN TO THE PERIDIA PART	344.043.437.000,00	322.243.333.303 ₁ 00	724.202.303.020,00	000.000.000,00	47 5.505.707.574,05	477.545.025.055,00
1.948.924.605.460,00 2.321.642.450.098,00 2.580.459.404.371,00 2.775.686.072.737,01 3.075.840.873.513,00 3.287.043.919.596							
		1.948.924.605.460,00	2.321.642.450.098,00	2.580.459.404.371,00	2.775.686.072.737,01	3.075.840.873.513,00	3.287.043.919.596,00

Sumber:

https://jdih.tangerangselatankota.go.id/, Tahun 2019, Diolah.

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder serta hasil observasi dan wawancara kepada sejumlah pihak, maka telah dilakukan analisis di mana apabila dilakukan revitalisasi pasar tradisional, akan berpengaruh pada pendapatan daerah.

Dengan adanya revitaliasi pasar, maka akan membuka peluang untuk menarik pospos pendapatan baru selain retribusi dari pedagang. Adapun persepsi para pengelola pasar terhadap program revitalisasi sangat positif. Hal itu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Persepsi Pengelola Pasar Terhadap Revitalisasi

PERSEPSI PENGELOLA PASAR TERHADAP REVITALISASI

No.	Nama Pengelola	Nama Pasar	Jabatan	Revitalisasi				Catatan
140.	Nama r engeloia	Nama rasar	Japatan	Fisik	Manajemen	Ekonomi	Sosial	
1	Endang Saputra/Nita	Pasar Ciputat	Kepala Pasar/Staf	Penataan sarana dan prasarana pasar agar lebih baik	Tata kelola pasar perlu dibenahi	Kegiatan ekonomi semakin meningkat	Lingkungan dibuat lebih menarik agar masyarakat tertarik	
2	Nasolihin	Pasar Ciputat Permai (Cimanggis)	Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar perlu perbaikan	Pasar Dikelola Secara Profesional	Terjadinya perputaran dan kegiatan ekonomi yang semakin cepat	Adanya perubahan lingkungan	Agar akses permodalan lebih mudah, maka perlu ada wadah para pedagang seperti koperasi, dsb.
3	Odih Fajar H	Pasar Jombang	Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar perlu perbaikan	Pasar Dikelola Secara Profesional	Terjadinya perputaran dan kegiatan ekonomi	Adanya perubahan lingkungan	Perlu adanya political will dari pemerintah untuk membenahi pasar
4	H. Odih	Pasar Bintaro Sektor 2	Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar sudah cukup	Pasar Dikelola Secara Profesional	Perputaran barang harus berlangsung cepat	Perubahan lingkungan agar lebih menarik	
5	Budi Uripto	Pasar Serpong	Staf Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar sudah cukup	Pasar Dikelola Secara Profesional	Menumbuhkan kegiatan perekeonomian	Lingkungan sudah bagus	
6	Midih	Pasar Jengkol	Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar sudah cukup	Pasar Dikelola Secara Profesional	Kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang	Perubahan lingkungan agar lebih menarik	Ciri khas pasar tradisional tidak boleh dihilangkan
7	Ardani	Pasar Kita Pamulang	Kepala Pasar	Sarana dan Prasarana pasar lebih ditingkatkan lagi	Pasar Dikelola Secara Profesional	Kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang	Lingkungan dibuat lebih menarik agar masyarakat tertarik	Kewenangan pengelolaan agar lebih dipertegas

Sumber : Hasil Wawancara, Tahun 2019, Diolah.

Selanjutnya potensi pendapatan yang akan diperoleh apabila pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan direvitalisasi sangat besar sekali. Pendapatan tidak hanya berasal dari retribusi, namun juga dari sektor-sektor lain. Hal itu sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Potensi Pendapatan Pasar Apabila Dilakukan Program Revitalisasi

POTENSI PENDAPATAN PASAR SETELAH REVITALISASI

No.	Nama Pengelola	Nama Pasar	Jabatan	Potensi	
1	Endang Saputra/Nita	Pasar Ciputat	Kepala Pasar/Staf	Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan, 6. PBB	
2	Nasolihin	Pasar Ciputat Permai (Cimanggis)	Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan	
3	Odih Fajar H	Pasar Jombang	Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan, 6. PBB	
4	H. Odih	Pasar Bintaro Sektor 2	Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Ijin Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan	
5	Budi Uripto	Pasar Serpong	Staf Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3 .Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan	
6	Midih	Pasar Jengkol	Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Pengelolaan Sampah	
7	Ardani	Pasar Kita Pamulang	Kepala Pasar	1. Retribusi, 2. Pengelolaan Parkir, 3. Pajak Restoran, 4. Reklame, 5. Izin Usaha Pertokoan, 6. PBB, 7. Penyewaan Perkantoran, 8. Penyewaan Tempat Untuk Pameran, 9. Penyewaan Toko Sepeti di Mall, 10. Rumah dan Toko (Ruko)	

Sumber: Hasil Wawancara, Tahun 2019, Diolah.

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

Dengan demikian, revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Tangerang Selatan akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Apabila revitalisasi dilakukan, maka pendapatan daerah akan meningkat.

Hasil analisis terhadap prinsip revitalisasi pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

FISIK. Meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.

Perbaikan fisik akan semakin menarik masyarakat untuk datang ke pasar tradisional. Pasar yang nyaman, bersih, dan bebas polusi akan meningkatkan animo untuk berbelanja. Hal ini berdampak pada pemasukan daerah melalui biaya jasa layanan yang akan dikeluarkan oleh setiap masyarakat yang datang ke pasar tradisional.

MANAJEMEN. Revitalisasi mampu membangun manajemen pengelolaan pasar yang mengatur secara jelas aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan dan pembiayaan, fasilitasfasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar.

Apabila manajemen pengelolaan pasar tradisional dilakukan secara profesional, maka akan semakin jelas hak dan kewajiban Semakin mempermudah pedagang. pedagang dalam memperoleh permodalan yang murah dan tidak terbebani sehingga pedagang akan semakin memiliki motivasi dan semangat dalam berdagang karena setiap hari ada pendapatan yang mereka peroleh tanpa harus memikirkan besarnya bunga pinjaman modal. Kemudian akan memperjelas SOP pengelolaan pasar di mana pedagang lebih tertib dan tertata dalam mengelola usahanya. Dampaknya bagi pemerintah akan semakin naiknya pendapatan dari retribusi pedagang, apalagi pedagang yang berjualan juga semakin tambah.

EKONOMI. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, untuk mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic development).

Kesempatan untuk berusaha semakin besar baik dalam sektor informal maupun formal. Pelaku pasar akan semain tambah jumlahnya. Sektor perekonomian daerah semakin tinggi perputarannya. Dampaknya, yaitu akan memicu perekonomian wilayah.

Sehingga, implikasi yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan dari sektor perekonomian yang secara langsung maupun tidak langsung beringgungan dengan proses bisnis yang ada di pasar tradisional.

SOSIAL. Menciptakan lingkungan yang menarik (interesting), dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (public realms).

Perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja dan perilaku pedagang dalam berdagang apabila pasar tradisional direvitalisasi akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional. Namun dari prinsip sosial budaya, ciri khas pasar taradisional atau ciri khas daerah Kota Tangerang Selatan yang dibenamkan ke dalam bangunan fisik pasar tradisional tidak boleh dihilangkan agar menarik masyarakat secara kultural untuk datang berbelanja ke pasar. Ciri khas pasar tradisional yang senantiasa menyediakan bahan-bahan dagangan yang masih segar atau fresh merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dampaknya, semakin menarik minta masyarakat berbelanja ke pasar tradisional daripada pasar modern atau mall yang menyediakan bahan-bahan dagangan yang sudah tidak segar dan diawetkan. Semakin banyak masyarakat yang berbelanja ke pasar tradisional, secara ekonomi semakin meningkat pendapatan daerah yang berasal dari retribusi turunan atau retribusi ikutan di luar retribusi dari pedagang pasar yang berasal dari iuran bulanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan mutlak dilakukan. Dengan adanya revitalisasi pasar akan mendorong pengelolaan pasar yang lebih modern. Adapun konsep revitalisasi meliputi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial.

Data menunjukkan bahwa pendapatan dari retribusi pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yaitu berturut-turut sebesar Rp. 1.170.151.426,-, Rp. 1.220.578.444,-, dan Rp. 1.347.500.194,-. Dengan demikian kontribusinya dapat dikatakan masih sangat kecil yaitu berkisar antara 1% sampai 1,5%, apabila dibandingkan dengan perolehan

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

retribusi secara keseluruhan yang ada pada APBD Kota Tangerang Selatan.

Setelah dilakukan revitaliasi, adapun potensi pendapatan selain dari retribusi, yaitu antara lain dari pengelolaan parkir, pajak restoran, reklame, izin usaha pertokoan, pajak bumi dan bangunan, penyewaan perkantoran, penyewaan tempat untuk pameran, penyewaan toko seperti di mall, rumah dan toko (ruko), dan pengelolaan sampah.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah segera dilakukannya revitalisasi pasar tradisional oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pengembangan hasil temuan yaitu akan dilakukannya penelitian lebih lanjut setelah pasar-pasar tradisional direvitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bintoro, R.W., Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010: 360-374.
- [2] Firdaus, Ahmad Heri, https://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2019/03/12/bangk itkan-ekonomi-kerakyatan-revitalisasipasar-tradisional-mesti-digalakkan, 2019.
- [3] Halim, Abdul, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 2002.
- [4] Halim, Abdul, Akuntansi Keuangan Daerah, 2002.
- [5] H, Lukman, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2006.
- [6] Handoko, A.T., Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kab. Pemalang Tahun 2007-2011, Economics Development Analysis Journal, 1 (2), 2012: 1-7.
- [7] Istiningtyas, D.A., Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bogor, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, http://repository.ipb.ac.id/handle/1234 56789/1509, diakses 7 Januari 2018.
- [8] Marselina, E., Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2013: 1-25.
- [9] Martini, L.K.B., Kepramareni, P., Widyani, A.A.D., Strategi

- Pengembangan Pasar **Tradisional** dalam Upaya Mengantisipasi Pertumbuhan Pasar Modern di Bali, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepada "Inovasi Iptek Perguruan Tinggi untuk Kesejahteraan Meningkatkan Masyarakat, Unmas Denpasar, 29-30 Agustus 2016.
- [10] Megawati, N.A., & Soejoto, A., Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 4, No. 3, 2016: 1-10.
- [11] Noor, A., Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern, *Economica*, Vol. IV, Edisi 12, November 2013: 107-120.
- [12] Pratisto, Arief "Cara mudah mengatasi masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12", PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2004.
- [13] Purwanto, W., Analisa Persaingan Antara Pasar Tradisional dengan Pasar Modern Studi Kasus di Kawasan Ciledug Tangerang, *Jurnal MIX*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2012: 113-124.
- [14] Sadino & Syahbana, J.A., Pasar Tradisional Versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan [2] Gondokusuman Kota Yogyakarta), Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 10 (2), Juni 2014: 205-217.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- [16] Sukaatmadja, I.P.G., Yasa, N.N.K., Rahyuda, H., Widagda, I.G.A.Ngr.J., 2014, Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan di Bali, Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014: 121-129.
- [17] Suparmoko, M., Ekonomi Publik, 2001.
- [18] Suryadarma, D., Poesoro, A., Akhmadi, Budiyati, S., Rosfadhila, M., Surhayadi, A., 2010, Traditional Food Traders in Developing Countries and Competition from Supermarket: Evidence from Indonesia, Food Policy, 35, 2010: 79-86.

Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam's Research Result

- [19] Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., Akhmadi, Rosfadhila, M., 2007, Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia, SMERU Research Institute, http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/supermarket_ind.pdf, diakses 7 Januari, 2018.
- [20] Yandri, Pitri, Determinasi Tarif Retribusi Pasar Tradisional Dengan Pendekatan Willingness To Pay dan Perbandingan Harga Pasar, AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, September 2018: 306-323.
- [21] Zain, Mohammad, Manajemen Perpajakan, 2003.